**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

 Pendidikan yang berkualitas akan muncul apabila terdapat sekolah yang berkualitas salah satunya mempunyai kelengkapan fasilitas yang menunjang proses balajar mengajar tersebut. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana pendidikan. Prasarana pendidikan ini juga berperan dalam proses belajar mengajar walaupun secara tidak langsung. Bila suatu sekolah kurang memperhatikan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan, maka siswa-siswanya kurang bersemangat untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Hal ini mengakibatkan prestasi belajar anak menjadi rendah.

 Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) salah satunya dapat dilakukan melalui upaya pembangunan pendidikan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar (UUD) yang menyatakan bahwa (1) setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta ahlak mulia dalam rangka menghidupkan kecerdasan bangsa; (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; serta (5) pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Demikian pula UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

 Pemerintah telah menjabarkan mengenai rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk pembangunan pendidikan periode 2016-2021 yaitu untuk menguatkan pelayanan, menitik beratkan pada rasio kebutuhan dan kesediaan sarana dan prasarana pendidikan nasional menjadi optimal agar mutu pendidikan menjadi relevan dan berdaya saing dengan penggunaan strategi *milestone* peralihan fokus atau penekanan dari pembangunan aspek kuantitas kepada aspek kualitas.

 Kabupaten Bandung sebagai salah satu kabupaten yang memiliki daya topang pada aspek pendidikan, telah melaksanakan konsep pendidikan untuk semua (*Education For All*) yang menyentuh level usia masyarakat kabupaten Bandung dari nol sampai dengan angka harapan hidup. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan di Kabupaten Bandung diarahkan pada penuntasan wajar dikdas 9 tahun sebagai prioritas sampai dan diawali dengan perintisan dan penuntasan wajar 12 tahun dengan standar mutu yang semakin baik (kompetitif). Berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan misi ke-5, menuntut pembangunan pendidikan memfokuskan program pada pendidikan budi pekerti, pendidikan yang menggabungkan antara qolbu, akal dan jasadiah. Tidak hanya pendidikan yang sekedar menstransfer ilmu tapi juga membangun manusia yang memiliki karakter sehingga mutu lulusannya mampu menjadi tenaga kerja yang siap pakai, produktif, cerdas, berdaya saing serta memiliki iman dan taqwa.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggara pendidikan di pusat dan di daerah terkait dengan cara cara yang diperlukan untuk mencapai sasaran sasaran strategis yang menggambarkan tujuan tujuan strategis. Untuk itu, arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional ditujukan pada penguatan layanan pendidikan yaitu dengan terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional untuk membentuk insan indonesia cerdas komprehensif dengan upaya meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan , memperluas jangkauan layanan pendidikan, meningkatkan kualitas mutu/relevansi layanan pendidikan, mewujudkan kesetaraan dalam emmperoleh layanan pendidikan, menjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan.

Tujuan startegis nasional dirumuskan berdasarkan jenjang layanan pendidikan dan sistem tata kelola yang diperlukan untuk menghasilkan layanan prima pendidikan sebagaimana yang dikehendaki , yaitu :

1. Tersedianya dan terjangkaunya layanan pendidikan bermutu di semua provinsi, kabupaten dan kota.
2. Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah yang bermutu, relevan dan berkesetaraan di semua Provinsi, Kabupaten/Kota;
3. Tersedia dan terjangkaunya layanan Pendidikan tinggi bermutu, relevan, berdaya saing internasional dan berketaraan di semua propinsi;
4. Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang berkesetaraan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat;
5. Tersedianya sistem tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan .
6. Terjaminnya pengelolaan pendidikan yang bersih transfaran dan akuntabel.
7. Tersedianya kesempatan bagi masyarakat untuk menanamkan nilai-nalai luhur budaya dan sejarah baik lokal maupun nasional.

 Gambaran diatas menunjukan bahwa adanya sejumlah komponen yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan prima pendidikan nasional yang mecakup pendidik dan tenaga kependidikan, pembelajaran dan penilaian, sarana dan prasarana, pendanaan dan tatakelola.

 Masalah yang harus dihadapi pemerintah adalah masalah publik yaitu nilai, kebutuhan atau peluang yang tidak terwujudkan. Masalah tersebut tidak dapat diidentifikasi tetapi hanya mungkin dicapai lewat tindakan publik yaitu melalui kebijakan publik. Berhubungan dengan pencapaian tujuan suatu bangsa dan pemecahan masalah publik, kebijakan publik merupakan serangkaian kegiantan yang mempuyai maksud untuk pencapaian seseorang atau pencapain suatu kelompok tertentu yang di hubungkan dengan permasalahan publik, kebijakan publik berdasarkan upaya-upaya pencapain tujuan nasional suatu bangsa dapat di pahami sebagai aktivitas-aktivitas yang di kerjakan untuk mencapai suatu tujuan nasional dan dapat di sederhanakan dengan mengetahui sejauh mana pencapaian cita-cita yang telah di tempuh.

 Proses kebijakan publik serangkaian kegiatan yang menyiapkan, menentukan, melaksanakan serta mengendalikan kebijakan. Efektivitas suatu kebijakan publik di tentukan oleh proses kebijakan yang melibatkan tahapan-tahapan dari variable-variable. Efektivitas suatu kebijakan publik sangat di tentukan oleh proses kebijakan yang terdiri dari formulasi, implementasi kebijakan dan evaluasi.

 Implementasi kebijakan merupakan tahap yang sangat sulit sekali dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan harus di implementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diingginkan sesuai dengan harapan. Tahapan implementasi kebijakan akan di mulai ketika sudah tersususnya suatu sasaran yang di tetapkan terlebih dahulu di lakukan formulasi kebijakan. Dengan demikian implementasi kebikanan bisa berjalan dengan lancar dengan undang-undang yang telah di tetapkan.

 Berdasarkan dengan pengumpulan data selama 5 hari di kabupaten Bandung terdapat masalah yang saya temukan di sana yaitu kurangnya fasilitas sekolah yang memadai, akibatnya banyak lususan sekolah dasar masih belum bisa tertampung secara keseluruhan di sekolah menengah pertama negeri maupun swasta, karena terbatasnya jumlah sekolah, maupun jumlah ruang kelas yang ada di sekolah tersebut, sehingga banyak lulusan sekolah dasar yang tidak bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya.

 Kurangnya fasilitas sarana prasarana sebagai penunjang pendidikan, seperti gedung sekolah yang tidak layak, atau jumlah ruang kelas yang terbatas, ruang penunjang lainnya seperti ruang perpustakaan, ruang laboratorium, sampai mebeulair ruang kelas, mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya, bahkan menjadikan anak-anak menjadi tidak semangat untuk sekolah.

 Pengadaan, distribusi, penertiban, perbaikan dan pemeliharaan gedung, perabot dan alat peraga sekolah, pengadaan tanah, yang bervariasi tidak berdasarkan standarisasi. Hal tersebut yang mengakibatkan terhambatnya realisasi kebijakan sarana prasarana pendidikan, bahkan masih ada tanah dan bangunan sekolah yang digugat lalu disegel oleh pihak Desa seperti SMPN 1 Banjaran dan SMPN 2 Soreang karena bangunan sekolah berdiri di tanah Desa, sehingga murid-murid terpaksa belajar tidak semestinya. Selain terhambat dalam pembangunan prasarana pendidikan jugan banyak hambatan dalam pengadaan sarana pendidikan yang mengakibatkan masih banyaknya sekolah yang kekurangan buku paket dan alat peraga edukatif sehingga menyulitkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah bersama masyarakat untuk mengatasinya. Masalah dapat diindikasikan kedalam sumber-sumber biaya pembangunan, pemeliharaan.

 Bertitik tolak dari latar belakang yang diuraikan di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan lokus dari penelitian ini yaitu Dinas Pendidikan di kabupaten Bandung dengan Implementasi Kebijakan Sarana Prasarana Pendidikan Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Bandung sebagai fokus penelitian yang berlandaskan pada Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SMP, lalu menuangkannya ke dalam bentuk penelitian dengan judul "Implemantasi Kebijakan Sarana Prasarana Pendidikan Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Bandung".

* 1. **Fokus Penelitian**

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti menetapkan fokus masalah sebagai berikut: Bagaimana Implementasi Kebijakan Sarana Prasarana Pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Bandung yang dilaksanakan oleh Seksi Sarana Prasarana Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.

* 1. **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini, diharapkan dapat Mendeskripsikan bagaimana Implementasi Kebijakan Sarana dan Prasarana Pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Bandung yang dilaksanakan oleh Seksi Sarana Prasarana Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.

* 1. **Kegunaan Penelitian**

 Hasil dari penelitian ini diharapkan penulis mampu memberikan kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis sebagai berikut :

**a. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu Administrasi Negara yang berkaitan antara kebijakan pemerintah dan implementasi kebijakan.

**b. Secara Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan untuk pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat tentang Implemantasi Kebijakan Sarana Prasarana Pendidikan Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Bandung.

* 1. **Lokasi dan Lamanya Penelitian**

Penelitian mengambil lokasi penelitian sesuai dengan masalah yang menjadi acuan penelitian dan mengambil waktu penelitian sebanyak yang diperlukan peneliti untuk menyelesaikan penelitian.

**1. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang dijadikan sebagai objek penelitian yaitu Bidang Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, dengan alamat Jalan Raya Soreang Km. 17 , Soreang, Kabupaten Bandung 40912.

**2. Lamanya Penelitian**

Lamanya penelitian selesai dalam jangka waktu 5 bulan, yaitu dari jadwal penjajagan yang dilaksanakan pada tanggal 1 s.d. 5 Febuari 2018, serta pelaksanaan penelitian mulai Februari s.d. Juni 2018.

**Tabel 1.1. Jadwal Penelitian**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Kegiatan | Tahun 2018 |
| Februari | Maret | April | Mei | Juni |  |
| **1** | **TAHAPAN PERSIAPAN** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a. Perijinan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b. Penjajagan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c. Pengajuan Judul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d. Bimbingan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d. Pembuatan Usulan Penelitian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f. Pengesahan Usulan Penelitian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **TAHAP PENELITIAN** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a. Riset dan Penelitian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **TAHAP PENYUSUNAN** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a. Pengolahan Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b. Analisis Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c. Pembuatan Laporan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **TAHAP PENGUJIAN** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a. Sidang Skripsi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Sumber : Jadwal Penelitian Penulis